INSTRUKSI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1966
TENTANG
IZIN TERHADAP ORANG-ORANG TAHANAN/HUKUMAN

MAHKAMAH AGUNG

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1

JAKARTA

Jakarta, 25 Oktober 1966

No : 578/K-M/2544/M/A.III/66
Lampiran : -
Perihal : Izin terhadap orang-orang Tahanan/hukuman.

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan
Tinggi Pengadilan Negeri
di Indonesia.

SURAT EDARAN/INSTRUKSI
NOMOR 9 TAHUN 1966

1. Beberapa kali telah terjadi, bahwa suatu Pengadilan Tinggi/Negeri atau seorang Hakim memberikan begitu saja surat izin kepada seorang tahanan/hukuman untuk sesuatu keperluan (berobat, mengunjungi keluarga, dan lain-lain) ataupun untuk "dipinjamkan" kepada sesuatu instansi yang memerlukan tenaganya meninggalkan tempat tahanan/hukumannya, tanpa cukup mempersoalkan tempat tahanan/hukumannya, tanpa cukup mempersoalkan apakah pemberian izin itu adalah wewenang dari:
 - a. Pengadilan pada umumnya;
 - b. Pengadilan yang bersangkutan dengan mengingat taraf penyelesaian perkaranya.
2. Sebagaimana diketahui, maka terhadap seorang tahanan Pengadilan pada umumnya hanya berwenang untuk mempertanggungkan (schorsen) penahanannya berdasarkan dan melalui prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 358 d.b. dari H.I.R. pertanggunghan mana sekalipun tidak ditentukan kemungkinan alasan-alasannya, perlu dipertimbangkan dengan seksama sekali dengan memperhatikan adanya bahaya ia melarikan diri (dalam perkara bera, lebih-lebih jika ia berwarganegara asing) atau lain hal yang disebut dalam Pasal 38c (1) H.I.R. sekalipun tidak diharuskan menurut Pasal 358 H.I.R, namun di seyogyakan untuk sebelum menentukan suatu pertanggunghan tahanan meminta pertimbangan lebih dahulu dari Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.
3. Dalam hal perkara telah diputus dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, dan terdakwa mohon banding, maka semenjak itu Pengadilan Tinggi lah yang berwenang menentukan ditahan atau tidaknya ataupun dapat tidaknya permohonan untuk mempertanggungjawabkan tahanan dikabulkan (Pasal 12 dari Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951) dalam hal mana Pengadilan Tinggi mutatis mutandis harus memperhatikan hal-hal yang tertera dalam ayat 2 di atas.

4. Mengenai orang-orang hukuman yang sakit dan perlu dirawat dalam rumah sakit, jika perlu di tempat lain, adalah Kepala Daerah atau Menteri Kehakiman yang berhak menentukannya (Pasal 81 Gestictenreglement) dan bukan pihak Pengadilan.
5. Juga "peminjaman" seorang tahanan/hukuman oleh sesuatu instansi sebagai tidak berdasarkan Hukum hendaknya tidak diizinkan oleh Pengadilan.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

Ttd.

(SOERJADI)

Atas Perintah Majelis:

Panitera,

Ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH)